

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian hanya akan terwujud jika pembangunan pertanian mampu memperbaiki kondisi usaha tani skala kecil. Usaha tani skala kecil ini memiliki peran penting. Mulai dari pelaku riil ekonomi dalam produksi, kerjasama permodalan, tenaga kerja hingga pemasaran produk. Sayangnya, mereka masih terkendala mencapai skala ekonomi karena sumberdaya manusia yang rendah, lahan yang terbatas, akses yang lemah terhadap sumberdaya produktif, teknologi, informasi dan pasar. Keberadaan usaha tani skala kecil ini pun menyebar di berbagai negara, mendominasi hingga 85 persen di Asia, dengan kepemilikan lahan rata-rata 1 hektar dan 6 persen di Sub Sahara Afrika dengan kepemilikan lahan rata-rata 1,3 hektar. Usaha tani skala kecil kesulitan mencapai skala ekonomi (Sumaryanto, 2009; APCAS, 2010; Thapa, 2010; Syahyuti, 2013; Imanullah, Latifah and Adistuti, 2016; Lowder, Skoet and Raney, 2016; Banik, 2017; Najeera, 2017; Raungpaka and Savetpanuvong, 2017; Sudaryanto and Simatupang, 2017; Vernet, *et al*, 2019; Upadhaya, Arbuckle and Schulte, 2020).

Usaha tani skala kecil pun mayoritas di Indonesia. Sensus Tani BPS 2013. Dan Hasil Survey Pertanian Antar Sensus 2018 menunjukkan usaha tani skala kecil di Indonesia mencapai 88 persen. Enam belas juta petani Indonesia dari 26,14 juta rumah tangga usaha tani adalah petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar); 8 juta petani menguasai lahan antara 0,5 hingga 2 hektar; 4 juta petani menguasai lahan antara 2-10 hektar. Hanya 87 ribu pemilik penguasaan lahan di atas 10 hektar. Di Provinsi Sumatera Barat, ada 3 ribu petani gurem, 600 ribu petani yang menguasai lahan 1-2 hektar; sebesar 29 ribu petani menguasai lahan melebihi 3 hektar. Pendapatan usaha tani skala kecil di Indonesia pun rendah berdasarkan Sensus Tani BPS 2013, Hasil Survey Pertanian Antar Sensus BPS tahun 2018, Survey INDEF yang disiarkan Okezone.com pada tahun 2017. Ini ditunjukkan juga dari nilai tukar petani rentang 2013-2020 fluktuatif.

Sektor pertanian pun memiliki produktivitas, efisiensi, peningkatan nilai tambah yang rendah dan kinerja perdagangan didominasi oleh komoditi belum diolah (BPS, 2013; BPS, 2018; Taifur, 2013). Bahkan kemiskinan menjadi bahagian dari sektor pertanian dimana 75 persen masyarakat miskin dunia adalah petani kecil, bahkan di Asia mencapai 87 persen (Syahyuti, 2013). Sektor pertanian kekurangan daya tarik sehingga berdampak pada semakin berkurangnya minat generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian sehingga mempengaruhi keberlanjutan sektor pertanian (BPS 2013; 2018).

Perbaikan kondisi usaha tani skala kecil memerlukan pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan memiliki kemampuan mengefisienkan biaya, memusatkan perhatian pelaku usaha dan meningkatkan hubungan antar pelaku usaha, meminimalisir kelemahan-kelemahan sumberdaya maupun keterbatasan anggaran sehingga lebih mampu mendorong tingkat pertumbuhan dan daya saing kawasan (Iqbal and Anugrah, 2009; Setiyanto, 2013; Kementan, 2014; Ahmad *et al.*, 2014). Keberhasilan pembangunan kawasan meningkatkan daya saing dibuktikan di negara-negara maju. Amerika, Eropa, Afrika dan Asia, telah menerapkan kawasan berbasis klaster yang didukung oleh teknologi dan pendekatan holistik (Sefrioui, 1999; Fajzrakhmanov *et al.*, 2013; Ahmad *et al.*, 2014; Youssef *et al.*, 2014; Djeflat and Kuznetsov, 2015; Malek, 2009, 2017). Kawasan yang berdaya saing ini memiliki iklim positif bagi dunia usaha sebagai wujud pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Daya saing merupakan kemampuan yang dibangun oleh produktivitas, efisiensi, nilai tambah dan kinerja perdagangan agar mampu meraih manfaat dari perdagangan global (Latruffe, 2010; McFetridge, 1995). Daya saing kawasan dipengaruhi faktor agregat layaknya kondisi makro (negara) sehingga perlu memperhatikan sistem lokal yaitu seperangkat faktor *common* (bersama), baik masalahnya dan upayanya (Kitson, Martin and Tyler, 2004; Mansfeld and Antrosio, 2009).

Pembangunan kawasan pertanian sudah banyak diterapkan di Indonesia. Bentuknya antara lain Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Sentra Produksi (KSP), Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kawasan Industri

Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Prima Tani dan Agropolitan. Teknopark menjadi bentuk terbaru pendekatan pembangunan kawasan pertanian. Pendekatan ini memiliki keunggulan, salah satunya adalah memiliki inkubator bisnis. Inkubator bisnis adalah wahana transformasi kreatifitas, inovasi serta jembatan terhadap khalayak. Inkubasi bisnis yaitu proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi, sekaligus menghubungkan dengan investor (Bappenas, 2004; Malek, Awang and Hussain, 2009; Omer, Ozdemir and Sehitoglu, 2013; Saputra, 2015; Tola and Contini, 2015; Hernandez and Carra, 2016; Stal, Andreassi and Fujino, 2016; Malek, 2017; Arini, Badarrudin and Kariono, 2018; Liu, 2020).

Ragam pendekatan itu belum mampu mewujudkan daya saing kawasan pertanian dan perbaikan kondisi usaha tani skala kecil. Pembangunan kawasan pertanian *stagnan*, hanya mencapai tahap pengembangan prasarana dan sarana fisik namun tetapi eksistensinya tidak terbangun. Kelemahan mulai dari rencana tata ruang wilayah (RTRW), kelembagaan agribisnis dan pengembangan agribisnis yang mencakup sistem usaha, kelembagaan ekonomi, dan kemitraan belum berjalan baik. Hal ini pun terjadi dalam fasilitasi untuk pengembangan sumberdaya manusia. Pembangunan kawasan pertanian belum memberikan dampak dan manfaat optimal ditinjau dari sisi partisipasi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat peserta program dengan kinerja yang variatif. Pembangunan kawasan pertanian masih bersifat *output oriented* (Rusastra *et al.*, 2002; Iqbal and Anugrah, 2009. Setiyanto, 2013; Kementan, 2014; 2015).

Ragam kelemahan pembangunan kawasan pertanian ini diakibatkan pola pembangunan masih belum menggandeng peran masyarakat dan pelaku usaha, bekerjasama dengan program pemerintah dan filantropi. Padahal, kemampuan pemerintah mengakses dan mengelola semua sumberdaya serta melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah sosial terhalang hambatan yang berasal dari lingkungan pemerintah diantaranya perilaku yang tidak efisien, batasan anggaran dan politik. Sementara filantropi, baik perusahaan maupun lembaga sosial

masyarakat sebagai pemberi sumbangan terhambat sumber pembiayaan (Yunus, 2008; Dhewanto et al, 2013; Firdaus, 2014). Sangat penting mengikutsertakan peran kewirausahaan, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini mengingat daya dorong kewirausahaan terhadap inovasi dalam pembangunan kawasan pertanian.

Kewirausahaan merupakan aktivitas yang menghubungkan pelaku, proses inovasi, sumberdaya dan peluang untuk mencapai keuntungan (Shane and Venkataraman, 2000; Ahmad and Seymour, 2006; Dahalan, Jaafar and Rosdi, 2013; Woodside, Bernal and Coduras, 2016; Yan and Yan, 2015; Aparicio, Urbano and Gómez, 2016; Woodside, Bernal and Coduras, 2016; Wiklund *et al.*, 2019). Kewirausahaan memiliki energi yang kuat sebagai sumber inovasi dalam menghadapi tantangan dalam membangun kawasan pertanian sehingga mampu, menghubungkan pertanian dengan globalisasi, mempercepat perubahan struktur usaha; menciptakan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran; menguatkan sektor primer, menumbuhkan sektor sekunder dan tertier; menciptakan daya saing melalui peningkatan kinerja usaha tani meningkatkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah untuk mencapai kemakmuran (Andreopoulou *et al.*, 2014; Yanya, Hakim and Razak, 2013; Elena, Sorina and Rus, 2015; Baranyi and Taralik, 2015; Hassink, Hulsink and Grin, 2016; Darmadji, 2016; Yuan *et al.*, 2017).

Negara-negara yang memiliki faktor kewirausahaan positif pun memiliki daya saing tinggi diantaranya Jepang USA, Cina, Korea Selatan dan negara-negara di Eropa. Tetapi, Sayangnya, kewirausahaan di Indonesia masih lemah. Menurut Global Index Monitoring (2016, 2017, 2019, 2020) Indonesia masih lemah dibandingkan se kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand Philipina dan Vietnam. Lemahnya kewirausahaan Indonesia disebabkan jumlah wirausaha yang masih sedikit, disamping rendahnya penguasaan teknologi. Kementerian Koperasi dan UKM (2016) menyatakan jumlah wirausaha Indonesia baru 1,6 ; padahal idealnya 2,5 persen dari populasi.

Pendekatan kewirausahaan di kawasan pertanian telah ada diantaranya berbentuk kemitraan petani dan pelaku usaha, tetapi belum berhasil menjadi solusi. Kelemahan pendekatan kewirausahaan di kawasan pertanian ini juga terjadi di berbagai negara. Kewirausahaan belum memperbaiki nasib usaha tani skala kecil di kawasan pertanian. Pendekatan kewirausahaan yang terbangun belum berhasil menselaraskan kepentingan semua pihak yang bekerjasama dan belum mewujudkan orientasi membantu usaha tani berskala kecil dan menengah. Ini mengakibatkan disharmonisasi antara pelaku yang berbentuk perusahaan dengan pelaku yang terdiri dari usaha tani skala kecil (Yanya, Hakim and Razak 2013; Buang and Suryandari, 2009).

Pendekatan kewirausahaan di kawasan pertanian menjadi tidak efektif karena selama ini menggunakan kewirausahaan individu dan kewirausahaan perusahaan. Kewirausahaan individu berorientasi pada individu rajin dalam menciptakan dan meraih peluang. Kewirausahaan perusahaan memiliki orientasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja. Karakteristik kewirausahaan individu maupun kewirausahaan perusahaan berorientasi pada kepentingan orang atau sekelompok pemilik modal sehubungan dengan modal yang dikelolanya atau berorientasi keuntungan (Shane and Venkataraman, 2000; Belousova, Gaily and Basso, 2010; Kaya, 2015). Pendekatan kewirausahaan tersebut tidak mampu menjangkau masalah sosial ekonomi dan lingkungan, sehingga belum berhasil memperbaiki ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Jennings *et al.*, 2013; Yanya, et al, 2013; Kuura, Blackburn and Lundin, 2014; Kibler *et al.*, 2018; Kimmitt, Munoz and Newbery, 2020). Ini membuktikan kewirausahaan konsep dan pola individu tidak tepat membangun untuk membangun daya saing kawasan pertanian.

Pendekatan kewirausahaan untuk membangun daya saing kawasan pertanian perlu mensinergikan kekuatan komunitas dan pelaku usaha sekaligus memiliki kepekaan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kewirausahaan ini dikenal sebagai kewirausahaan komunitas (Selsky and Smith, 1994; Dahalan, Jaafar and Rosdi, 2013; Sarreal, 2013; Fortunato and Alter., 2003; 2016). Kewirausahaan komunitas adalah sebuah sinergi antara kewirausahaan sosial dan komunitas. Kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai tindakan perorangan dan organisasi

yang mencoba memecahkan masalah sosial melalui inovasi maupun bisnis, dengan orientasi profit dan non profit (Molteni and Masi, 2009; Saifan and Drayton, 2012; Kuura, *et.al.*, 2014; Hassink, *et.al.*, 2016; Munoz and Kibler, 2016; Kibler *et al.*, 2018; Kuckertz, Berger and Br, 2020). Kewirausahaan komunitas merupakan kewirausahaan yang dibangun dari konsep dan pola tindakan kolektif.

Kewirausahaan komunitas menempatkan bisnis sosial memiliki peran strategis, dapat beroperasi dalam berbagai bentuk antara lain koperasi, organisasi non profit, bisnis sosial, perusahaan berbasis masyarakat, integrasi kemitraan nirlaba dan non nirlaba dan kepedulian korporasi (Matei and Matei, 2012; Rudito, 2014; Wiguna and Manzilati, 2014; Wiguna, Ananda and Susilo, 2015; Dhewanto *et al.*, 2013). Adapun komunitas didefinisikan sebagai sekumpulan anggota masyarakat yang memiliki ikatan sosial, sistem nilai, untuk memenuhi kebutuhan anggota pembentuk kelompok (Syahyuti, 2016; Sant & Elliot, 2017; Vernet *et al.*, 2019; Iles *et al.*, 2020; Khanal & Prasad, 2020; Minas *et al.*, 2020).

Kewirausahaan komunitas dengan kekuatan komponen kewirausahaan sosial dan komunitas, merupakan aktivitas sekelompok orang melakukan perubahan situasi ekonomi, sosial dan budaya sebagai proses sosial, budaya dan lingkungan. Masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai pengusaha, pemilik dan karyawan, berkolaborasi membuat dan mengidentifikasi peluang pasar; pelaku-pelaku usaha yang secara kolektif mengeksplorasi keunggulan lokal, membangun daya saing dan mempromosikan kesejahteraan lokal (Dahalan, *et al.*, 2013; Parwez, 2017; Roundy, 2019, Fortunato and Alter, 2016; Galappaththi, Galappaththi and Kodithuwakku, 2017; Becker, 2017; Meyer, 2020; Murphy *et al.*, 2020). Kewirausahaan komunitas berperan dalam bidang kepentingan bersama dan mengatasi masalah bersama, terikat dengan sistem lokal yang dipengaruhi faktor agregat, yaitu pengetahuan bersama (*common knowledge*) dan sumberdaya bersama (Kitson, *et.al.*, 2004, Mansfeld and Antrosio, 2009, Schaller *et al.*, 2018).

Penerapan kewirausahaan komunitas telah menunjukkan hasil positif dan mampu membangun bisnis lokal berbasis komunitas. Di Amerika Serikat dalam bentuk program berkebudayaan ekonomi; dari Kota Littleton Colorado berkembang

pesat di Amerika Serikat hingga diadopsi di Eropa dan Australia (Gibbons, 2010). Pembangunan ekonomi di Ogata, sebuah desa pertanian di Jepang dibangun melalui kewirausahaan komunitas sebagai kekuatan endogen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat (Yamamoto, 2007). Kewirausahaan komunitas mulai berkembang di Eropa, Afrika dan Asia termasuk Indonesia melalui peran CSR dan bisnis sosial. Kewirausahaan komunitas berkembang dikenal dengan bisnis sosial komunitas atau *community social enterprise* (Dana, 2008; 2015; Firdaus, 2014; Parwez, 2017; Mandrysz, 2020). Keberhasilan kewirausahaan komunitas dicapai dengan adanya partisipasi ragam pihak yang berkolaborasi menghubungkan kewirausahaan tradisional dengan manajemen bisnis modern.

Kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian dapat menjadi sumbangan terhadap pengetahuan. Publikasi yang terbit rentang 1998-2020, belum ada yang mengeksplorasi tentang kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian berbasis usaha tani skala kecil. Kajian tentang kewirausahaan sosial dan komunitas relatif sedikit dan masih bersifat konseptual (Jennings *et al.*, 2013; Sekliuckiene and Kisielius, 2015; Parwez, 2017; Mandrysz, 2020).

Kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian merupakan interaksi kewirausahaan yang memiliki karakteristik *common* dengan dimensi daya saing kawasan. Komponen yang terikat yaitu komunitas, kluster agribisnis dan sumberdaya bersama (Laerhoven and Ostrom, 2007; Syahyuti, 2016; Soylemezoglu and Doruk, 2014; Taib *et al.*, 2014; Sant and Elliot, 2017; Filho, Caleman and Cunha, 2017; Joffre, Poortvliet and Klerkx, 2019; Vernet *et al.*, 2019; Ervin *et al.*, 2019; Iles, Ma and Erwin, 2020; Meyer, 2020; Minas, Mander and Mclachlan, 2020; Otsuka and Ali, 2020; Bluffstone *et al.*, 2020; Graddy-Lovelace, 2020). Interaksi komponen tersebut melahirkan empat variabel (fungsi) kewirausahaan komunitas yaitu inovasi kolektif, manajemen rantai pasok kolektif, aksesibilitas kolektif terhadap sumberdaya ekonomi dan peluang, akumulasi keuntungan dan pembagian manfaat. Jadi, kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian merupakan tindakan bersama menggerakkan fungsi-fungsi inovasi, manajemen rantai pasok, aksesibilitas kolektif terhadap sumberdaya ekonomi dan peluang, serta akumulasi keuntungan dan pembagian manfaat.

Keberhasilan kewirausahaan komunitas memperbaiki masalah bersama petani bahkan berkontribusi secara sosial, ekonomi dan lingkungan, menunjukkan kekuatan kewirausahaan komunitas untuk mewujudkan daya saing kawasan pertanian. Daya saing kawasan pertanian merupakan daya saing meso. Menurut Kitson, Martin and Tyler (2004) dan Mansfeld and Antrosiom (2009); daya saing meso melibatkan *common knowledge, common problem dan commont effort*. Daya saing kawasan diindikasikan dari pergerakan iklim dunia usaha sebagai wujud pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pembuktian kiprah kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian berdasarkan penelitian di Kawasan pertanian Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Komunitas yang bersinergi dengan bisnis sosial (*community social enterprise*) memiliki efektifitas pengelolaan yang kuat terhadap fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas mencakup inovasi kolektif, manajemen rantai pasok kolektif, aksesibilitas kolektif terhadap sumberdaya ekonomi peluang, serta akumulasi profit (akumulasi keuntungan) dan pembagian manfaat. Hal ini ditunjukkan melalui sinergi kelompok tani dan Koperasi Solok Radjo (bisnis sosial komunitas). Keberhasilannya antara lain memperbaiki kondisi usaha tani skala kecil melalui perbaikan mutu, harga beli dan stabilitas harga pada petani, menjangkau pasar ekspor, meningkatkan pendapatan rata-rata, menguatkan modal sosial dan memperbaiki lingkungan. Efektifitas kewirausahaan komunitas yang dikelola dalam bisnis sosial komunitas ini lebih baik dibanding bila pengelolaannya mengandalkan kemampuan personal (*personal interest*) atau non bisnis sosial komunitas.

Bisnis sosial komunitas memiliki kemampuan lebih efektif mengelola fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian. Pengelolaan yang efektif terhadap fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas akan bekerja mengatasi masalah yang mengikat usaha tani skala kecil. Masalah tersebut diantaranya keterbatasan lahan, pencapaian skala ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan akses terhadap sumberdaya ekonomi, teknologi, informasi dan pasar. Perbaikan dilakukan berdimensi tindakan kolektif mencakup manajemen usaha,

pelayanan dan penyediaan sumberdaya sehingga mampu meraih pasar dengan mewujudkan skala ekonomi dan penciptaan nilai.

Kewirausahaan komunitas memberikan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam mengembangkan usaha sekaligus menunjukkan pelaku-pelaku usaha pertanian yang tak berdaya bila bertindak individual. Transformasi struktural diperlukan dengan kekuatan tindakan bersama membangun manfaat. Menurut Pranadji (2003) dan Saptana *et al.* (2004), transformasi struktural diperlukan untuk meubah pola individu ke pola kolektif.

Pengelolaan yang efektif terhadap fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas membantu beralihnya kewirausahaan komunitas tradisional ke kewirausahaan komunitas yang terhubung dengan sistem kewirausahaan modern. Kewirausahaan komunitas yang kuat memberikan ekonomi, sosial budaya kontribusi pada ekonomi regional yang dipengaruhi oleh struktur geografi, demografis, kondisi sosial budaya, sosial ekonomi dan lingkungan (Sjafrizal, 2018).

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan kawasan pertanian di Sumatera Barat memiliki hubungan erat dengan kewirausahaan komunitas. Sumatera Barat berpenduduk mayoritas suku Minangkabau. Etnik ini menonjol dalam kewirausahaan di Indonesia. Karakteristiknya cenderung dapat menerima perubahan dan perbedaan dalam masyarakat. Karakteristik suku Minangkabau yang berpengaruh terhadap kesuksesan kewirausahaannya diantaranya percaya diri, pekerja keras, perhitungan/hati-hati, ketangguhan pribadi, konsisten, peduli keluarga, kecerdikan, fleksibel, keberanian untuk menghadapi tantangan bisnis. Kewirausahaan di Minangkabau dipengaruhi sistem sosial budaya dan religi (Yulanda, 2015; Games, 2011; 2020). Kewirausahaan komunitas pertanian di Sumatera Barat dipengaruhi sistem matrilineal (garis ibu) diantara kepemilikan lahan dan pengelolaan usaha. Budaya kerjasama kelompok berbentuk antara lain *kongsi* dan *julo-julo* yang berperan dalam ketersediaan sumberdaya. Konsepsi kebersamaan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ini, cenderung menurun saat ini. Terjadi perubahan perilaku kolektif menjadi individual ditunjukkan antara lain keluarga inti matrilineal memisahkan diri dari keluarga luas matrilineal dan mengelola rumah tangga sendiri sehingga berpengaruh terhadap fungsi sosial

ekonomi harta pusaka, melemahnya kebersamaan dan tumbuhnya individualistis (Afrizal *et al.*, 2006).

Kewirausahaan komunitas dalam berbagai bentuk stagnan di Sumatera Barat. Menurut Games (2011), kewirausahaan komunitas tidak mampu bersikap agresif. Hal ini berkaitan dengan skala usaha kecil, permodalan dan kemampuan memasarkan. Tanpa kemampuan akan hal tersebut, kewirausahaan komunitas terjebak menjadi kewirausahaan tradisional. Tantangan ini juga dihadapi kewirausahaan komunitas sektor pertanian yang didominasi usaha tani skala kecil; dengan masalah utama meliputi lahan yang sempit modal kecil, akses kredit sulit, akses ke sarana produksi sulit, kesulitan menjual dengan jenis kesulitan berupa akses pasar, biaya transportasi mahal, pasar tidak tersedia dan harga rendah (BPS, 2013; 2018). Hal ini berdampak pada daya saing pertanian Sumatera Barat. Pengukuran BPS 2015 hingga 2020 menunjukkan nilai tukar petani Sumatera Barat fluktuatif dan cenderung lemah. FAO (2012 dan Taifur (2013) mengungkap kinerja perdagangan komoditi pertanian yang kuat daya saingnya hanya golongan barang minyak/lemak nabati dan hewani (minyak kelapa sawit, minyak biji sawit, asam berlemak, hasil biji, buah tanaman industri/obat). Komoditi lainnya masih lemah daya saingnya karena berupa produk mentah belum diolah. Perbaikan terhadap kondisi kewirausahaan komunitas dan daya saing pertanian Sumatera Barat ini, membutuhkan wadah dan kerjasama untuk memperbaiki dan memperkuat sinergi kekuatan komunitas dan pelaku usaha yang memiliki kepedulian (Games, 2011; Haris *et al.*, 2015).

Pemerintah perlu melahirkan kebijakan yang mendukung mengingat kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian memang masih lemah (Silfia, *et al.*, 2020). Dalam kebijakan masih terbatas, untuk menguatkan pertanian melalui pembangunan kawasan pertanian dilahirkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No: 521.305.2013 tertanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kementerian Pertanian pada tahun 2014 menguatkan Kabupaten Solok sebagai salah satu dari kawasan prospektif tingkat nasional. Dinas Pertanian Kabupaten Solok menetapkan kawasan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti adalah bahagian dari kawasan pertanian Kabupaten Solok.

Kawasan pertanian Lembah Gumanti memang masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan (Helmi *et al.*, 2019). Namun, kawasan pertanian Lembah Gumanti memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan. Masyarakat Lembah Gumanti menunjukkan semangat kewirausahaan sebagaimana yang dimiliki suku Minang. Masyarakat di Kecamatan Lembah Gumanti mayoritas bekerja sebagai pelaku usaha sektor pertanian; mencapai 77,55 persen dari 20727 penduduk. Mereka bergerak sebagai pelaku usaha tani maupun bergerak di sektor penunjang yaitu perdagangan, transportasi dan pergudangan. Bagi yang bergerak di sektor lain, ada yang terlibat di sektor pertanian sebagai pemodal dan memberlakukan sistem bagi hasil. Usaha tani berjumlah 10365 unit namun baru 477 unit melakukan pengolahan hasil. Pelaku pertanian ini mayoritas pengguna lahan dan pengambil keputusan. Untuk ketersediaan saprodi di Kecamatan Lembah Gumanti terdapat 109 kios, mencapai 35 persen dibandingkan keberadaan kios saprodi di kabupaten Solok yang berjumlah 309 unit (BPS, 2016; 2020).

Kelembagaan ekonomi yang mendukung kawasan pertanian ini dapat ditemukan dalam bentuk koperasi sebanyak 2 KUD, 6 koperasi pertanian, 1 koperasi pesantren dan 13 koperasi simpan pinjam. Kelembagaan ekonomi non formal yang memiliki peran pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha tani adalah Handel. Handel merupakan kelembagaan lokal yang memiliki makna adalah perputaran. Handel menggabungkan bentuk koperasi dan *julo-julo* untuk membantu petani yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dalam pengadaan modal usaha tani.

Begitu pula kekuatan komunitas petani telah diwadahi dalam kelompok tani. Menurut Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007; kelompok tani sebagai unit produksi, usahatani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi secara kuantitas dan kualitas. Kelompok tani memiliki tiga fungsi yaitu sebagai kelas belajar, wadah kerjasama dan unit produksi kontinuitas. Keputusan Bupati Solok N0 520-173-2016 tanggal 22 April 2016 terdapat 86 kelompok tani di Kecamatan Lembah Gumanti. Pendataan Badan Penyuluh Kecamatan Lembah Gumanti tahun 2018 menyatakan sudah terdapat

141 kelompok tani di Kecamatan Lembah Gumanti. Kelompok tani yang aktif hanya 15 persen (21 keltan).

Peran kewirausahaan komunitas ditemukan di kawasan pertanian Lembah Gumanti. Penelitian ini menunjukkan lima kelompok tani menunjukkan peran dan tingkat efektifitas yang kuat. Keunggulan ini berawal dari proses perubahan yang dimotori beberapa pelaku usaha tani skala kecil. Pelaku ini membangun kelompok tani Gunung Talang pada tahun 2013. Berawal dari upaya perbaikan harga komoditi, kekuatan komunitas dan kewirausahaan sosial berkembang. Tahun 2014 dipersiapkan bisnis sosial komunitas berbentuk Koperasi Solok Radjo. Tahun 2016 Koperasi Solok Radjo berkembang. Koperasi Solok Radjo menjadi sentral dalam menjalin sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha, investor dan meraih CSR. Sinergi yang terbentuk secara bertahap membangun kewirausahaan komunitas sebagai fungsi dari inovasi kolektif, manajemen rantai pasok kolektif, aksesibilitas kolektif terhadap sumberdaya ekonomi dan peluang serta akumulasi keuntungan dan pembagian manfaat. Koperasi Solok Radjo sebagai bisnis sosial komunitas berperan membangun usaha tani skala kecil di kawasan pertanian dengan memperbaiki harga beli komoditi, membuka lapangan pekerjaan, menjangkau *e-market* dan pasar ekspor, meningkatkan pendapatan hingga berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Hal-hal ini menunjukkan kewirausahaan komunitas membangun daya saing kawasan pertanian.

Pengukuran menggunakan Indeks Efektivitas Kewirausahaan Komunitas (*Community Entrepreneurship Effectivity Index/CEEI*) membuktikan kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Solok Radjo memiliki efektifitas yang kuat dalam mengelola fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas. .Sayangnya, mayoritas komunitas di kawasan pertanian menunjukkan perlu peningkatan pengembangan kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian .Kelompok-kelompok tani yang tidak dikelola bisnis sosial komunitas lebih banyak dan masih berada di tingkat efektifitas sedang dan lemah. Perbedaan ini terkait dengan cara pengelolaan dan pengelola. Kondisi ini dihadapi mayoritas kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian. Menurut Tohani (2017) kewirausahaan komunitas memang masih

lemah sehingga memerlukan pembangunan dan pengembangannya untuk berperan optimal membangun daya saing.

Penelitian ini menjawab masalah utama “mengapa kewirausahaan komunitas belum mampu membangun daya saing kawasan pertanian?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan mengetahui perkembangan kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian. Perkembangan kewirausahaan komunitas merupakan gambaran perubahan dan penambahan kemampuan struktur dan fungsi yang terbangun pada kewirausahaan komunitas. Perkembangan kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian didasarkan pada efektifitas pengelolaan fungsi kewirausahaan komunitas. Ini mencakup inovasi kolektif, manajemen rantai pasok kolektif, aksesibilitas kolektif terhadap sumberdaya ekonomi dan peluang serta akumulasi keuntungan dan pembagian manfaat.

Pertanyaan penelitian ini :

- a. Bagaimana perkembangan kewirausahaan komunitas dalam kawasan pertanian?
- b. Bagaimana kewirausahaan komunitas membangun daya saing kawasan pertanian?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah kewirausahaan komunitas optimal membangun daya saing kawasan pertanian dengan :

- a. Menganalisa perkembangan kewirausahaan komunitas dalam kawasan pertanian.

Hal ini dilakukan dengan mengukur kondisi kewirausahaan komunitas dan menganalisisnya berdasarkan efektifitas pengelolaan fungsi fungsi kewirausahaan komunitas..

- b. Merekonstruksi model bisnis sosial komunitas untuk membangun daya saing kawasan pertanian.

Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi potensi keunggulan yang telah diungkap di kawasan pertanian, pengalaman yang telah berhasil membangun daya saing kawasan diperkaya konsep dan model bisnis yang berkembang secara universal.

1.4. Proposisi

Proposisi penelitian terdiri atas:

- a. Kewirausahaan komunitas hanya akan berkembang di kawasan pertanian bila pengelolaan efektif terhadap fungsi-fungsi kewirausahaan komunitas. Ini mencakup inovasi kolektif, manajemen rantai pasok kolektif, aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi dan peluang, serta akumulasi keuntungan dan pembagian manfaat.
- b. Pengembangan kewirausahaan komunitas untuk membangun daya saing kawasan pertanian tidak akan efektif bila tidak dikelola oleh bisnis sosial komunitas.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah

- a. Perkembangan kewirausahaan komunitas diukur menggunakan indeks efektifitas kewirausahaan komunitas. Pengukuran menggunakan kriteria-kriteria yang dirumuskan berdasarkan fungsi kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian.
- b. Rekonstruksi model model bisnis sosial komunitas berdasarkan potensi keunggulan empiris dan konseptual. Model bisnis sosial komunitas memiliki dimensi tindakan kolektif tanpa menghambat pengembangan potensi individual, dalam membangun usaha tani skala kecil untuk mewujudkan daya saing kawasan pertanian.

1.6. Manfaat Penelitian

Kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian menjadi sumbangan terhadap pengetahuan karena kajian tentang kewirausahaan sosial dan komunitas relatif sedikit dan masih bersifat konseptual (Jennings *et al.*, 2013; Sekliuckiene and Kisielius, 2015). Penelitian ini bermanfaat untuk pengayaan pengetahuan pembangunan pertanian berbasis kawasan:

- a. Konseptualisasi kewirausahaan komunitas di kawasan pertanian.
- b. Rekonstruksi model bisnis yang mentransformasi pola individu ke pola kolektif untuk membangun daya saing kawasan pertanian.